# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA dan KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Hubungan internasional

Hubungan internasional merupakan bagian dari sosiologi yang secara khusus mempelajari masyarakat internasional (*Sociology of international relation*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik, tetapi juga mencakup unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (*Schwarzenberger* dalam Perwita dan Yani, 2005: 1). Sementara itu, *Mc. Clelland* dalam Perwita & Yani mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis unit sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan di sekitar interaksi (*Mc. Clelland* dalam Perwita dan Yani, 2005: 4).

Pola hubungan internasional tidak terlepas dari segala bentuk interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh aktor negara maupun aktor non negara. Pola hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, dan konflik atau konflik (Rudy, 2003: 2).

Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi antara aktor atau anggota suatu masyarakat dengan aktor atau anggota masyarakat lainnya. Secara umum kajian hubungan internasional merupakan kajian tentang interaksi antar aktor yang melintasi batas negara. Hubungan internasional di masa lalu difokuskan pada studi tentang perang dan perdamaian kemudian diperluas untuk mempelajari

perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang terjadi dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global namun tetap terfokus pada hubungan politik yang pada umumnya disebut "politik tinggi". Bahwa hubungan internasional saat ini selain tidak hanya memfokuskan perhatian dan kajian terhadap hubungan politik yang terjadi antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, tetapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor non negara. .

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah menjadi multipolar atau secara khusus telah menggeser persaingan yang bernuansa militer menuju persaingan atau konflik kepentingan ekonomi antar negara di dunia. Setelah perang dingin, masalah hubungan internasional yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada isu politik tinggi (politik dan keamanan) berkembang menjadi isu politik rendah (isu HAM, ekonomi, lingkungan, terorisme) (Perwita dan Yani, 2005: 7) .

Interaksi internasional terjadi tidak hanya melalui interaksi, tetapi juga melalui berbagai interaksi yang dilakukan oleh negara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ketika entitas negara menjalin hubungan di dunia internasional, negara tersebut terlibat dalam sejenis interaksi yang disebut interaksi internasional. Hal ini didasarkan pada hubungan negara dengan dunia internasional, dalam hubungan ini negara harus memperhatikan kepentingannya di kancah internasional.

Dalam interaksi internasional, interaksi terdiri dari jumlah pihak yang menjaga hubungan, dan hubungan tersebut dibagi lagi menjadi hubungan bilateral,

trilateral, regional, multilateral atau internasional. Dari perspektif dan tujuan semua pihak, kita dapat melihat pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi tersebut. Pihak yang menjaga hubungan timbal balik dibedakan menjadi modus kerjasama, modus persaingan dan modus konflik (Perwita dan Yani, 2005: 42).

Seperti yang ditunjukkan oleh Karen Mingst dalam "Pengantar Hubungan Internasional":

> *"Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas subnasional seperti Pemerintah daerah dan individu" (Wijatmadja, 2016 : 4-5).*

Menurut Bakry, "Hubungan Internasional mengkaji interaksi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik itu *state actor*, maupun *non-state actor* meliputi negara bangsa, organisasi internasional dan perusahaan multinasional, studi hubungan internasional mencoba menjelaskan berbagai interaksi antarnegara, masyarakat dan institusi yang melintasi batas-batas nasional, mulai dari studi tentang perang, damai hingga kerja sama ekonomi dan konflik lingkungan" (Bakry, 2016 : 59).

Dua definisi pertama menekankan cara interaksi dalam hubungan internasional. Modus interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa kerjasama, persaingan atau konflik.Bentuk kerjasama, persaingan atau konflik adalah semua interaksi antara peserta negara dan non-negara. Anggota Asosiasi Sosial Internasional. Menurut KJ Holsty dalam bukunya "Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis", hubungan internasional selalu dikaitkan dengan

interaksi, berbagai interaksi yang melintasi batas negara atau hukum, dan keduanya adalah interaksi antara pemerintah dengan negara, atau negara antar negara.

Tema penelitian internasional meliputi tiga bentuk interaksi: hubungan antar negara, hubungan transnasional non-negara atau transnasional, dan fungsi negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan sistem yang terutama (Wijatmadja 2016: 5). Merupakan ilmu yang mempelajari hubungan internasional untuk mempelajari dinamika berbagai bidang, seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (IO), organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah internasional. (INGO). Organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan multinasional (TNC), hukum internasional, teori hubungan internasional, dll. Pengakuan penelitian hubungan internasional terutama berasal dari pengakuan akan pentingnya mencegah perang dan menjaga ketertiban dunia. Menyebabkan korban manusia dan menimbulkan kerugian materi yang signifikan (Darmayadi, 2015: 19).

Secara tradisional, ruang lingkup hubungan internasional adalah bahwa negara-negara peserta hubungan internasional memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, terutama masalah keamanan dan kekuasaan nasional. Pada saat itu, krisis antar negara, perlombaan senjata, perang, dan penyebab perang menjadi tema sentral hubungan internasional. Kemudian diplomasi, hukum internasional, tatanan dunia, gender, lingkungan, dll menjadi tema hubungan internasional.

Aktor dalam hubungan internasional adalah siapa saja yang berperan dalam hubungan internasional yang melibatkan suatu negara, maupun bukan negara. Berikut ini diantaranya; Negara yang berinteraksi dengan aktor dalam hubungan

internasional untuk mengejar kepentingan nasional; Organisasi internasional: organisasi yang memiliki kegiatan di dua atau lebih negara yang melampaui batas nasional; Perusahaan multinasional - banyak kantor di berbagai negara perusahaan wilayah dan berada di negara asal. Teroris adalah istilah yang merujuk pada tindak kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain (Wijatmadja, 2016: 100-115).

### 2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah cara suatu negara mengejar dan memperoleh kepentingan nasionalnya guna menjalin hubungan dengan negara lain. Suatu negara telah mengambil beberapa langkah dalam menjalankan politik luar negerinya. Pertama, suatu negara menentukan semua tujuan dan arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting, seperti kapabilitas negara, situasi dunia luar saat ini, dan sebagainya. Kedua, perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk mencapai tujuan nasional, biasanya akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Ketiga, mempublikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya, didalamnya terdapat serangkaian tindakan dalam kebijakan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara.

Politik luar negeri merupakan cara yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka untuk mengejar dan mendapatkan kepentingan nasionalnya melalui hubungan yang dibangun dengan negara lain. Dalam melakukan politik luar negerinya, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh sebuah negara. Pertama, sebuah negara menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya. Kedua, perumusan kebijakan dalam politik

luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Ketiga, keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan negara. Selanjutnya negara akan melaksanakan politik luar negerinya sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Hal ini dilakukan dengan cara berhadapan dengan dunia luar, kemudian muncul kapabilitas baru suatu negara, akan tercapai tujuan lain, dan kemudian akan pulih kembali. pada proses awal yaitu evaluasi Informasi (Perwita dan Yani, 2005: 60).

Negara dengan lingkungan strategis niscaya akan memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda, demikian pula kondisi negara yang melaksanakan politik luar negeri, yang akan mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri negara lain (Perwita dan Yani, 2005: 62). -63).

Definisi dasar dari kebijakan luar negeri adalah "*action theory*", atau kebijakan nasional yang ditujukan untuk mencapai kepentingan tertentu di negara lain. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) adalah rangkaian rumusan nilai, sikap, arah dan tujuan, yang bertujuan untuk memelihara, menjamin dan memajukan kepentingan nasional di panggung internasional melalui strategi atau rencana yang disebut kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh pengambil keputusan. ( Perwita & Yani, 2005: 47-48).

### 2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Ada beberapa definisi tentang kebijakan luar negeri dengan tekanan yang berbeda-beda. Berikut ini akan diberikan definisi yang sering digunakan oleh akademisi maupun praktisi.

Menurut Mark R. Amstutz mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai *explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundries*. Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan negara. Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupkan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.

Definisi yang diberikan Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan luar negeri sebagai *decisions governing authorities make to realize international goals*. Dalam hal ini kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan (Aleksius, 2008 : 64-65).

Perwita dan Yani mendeskripsikan secara umum mengenai kebijakan luar negeri, menurut mereka kebijakan luar negeri dapat dibedakan sebagai sekumpulan orientasi, sekumpulan komitmen dan rencana aksi, dan sebagai suatu bentuk perilaku. Setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar dengan bentuk kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:55).

Selama Perang Dingin, keamanan nasional dan kekuatan ekonomi yang erat terhubung, terutama untuk kekuatan besar, yang menerangi mengapa para pembuat kebijakan luar negeri dilihat hampir segala sesuatu melalui lensa keamanan dan kekuasaan materi. Oleh karena itu, penyediaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan dukungan untuk hak asasi manusia sebagian besar terperangkap dalam persaingan untuk keamanan dan kekuasaan dipupuk oleh sistem internasional bipolar. Dalam lingkungan ini, masalah kesehatan pada dasarnya tidak berpengaruh independen pada pembuatan kebijakan luar negeri (David, 2009: 11)

Ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu:

1. Tujuan kepentingan dan nilai inti kepentingan dan nilai inti dapat digambarkan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti seringkali dihubungkan dengan pemeliharaan diri suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejarnya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri. Definisi yang tepat dari nilai atau kepentingan inti di negara tertentu tergantung pada sikap mereka yang membuat kebijakan.

2. Tujuan jangka menengah terdapat beberapa tujuan jangka menengah yaitu: Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi adalah tujuan utama semua pemerintah pada zaman ini tidak dapat dicapai

dengan kekuatan sendiri. Karena terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh satu negara misalnya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi maka perlu adanya interaksi dengan negara lain. Hal ini dapat dilakukan melalui perdagangan, bantuan luar negeri, akses informasi yang dapat juga meningkatkan kesejahteraan. Jenis yang kedua dari tujuan jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Pada saat ini, prestise dapat diukur melalui tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi.

Tujuan jangka menengah ini tidak mempunyai unsur waktu khusus, tetapi sebagian pemimpin masa kini dan negara berkembang berharap dapat mulai mengejar negara-negara yang ekonominya lebih maju. Negara industri dan negara maju dapat meningkatkan gengsi internasionalnya melalui sejumlah kebijkan dan tindakan, termasuk ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjungan balasan oleh kepala negara serta pameran industri. Tujuan jangka menengah yang ketiga mencakup banyak bentuk perluasan diri. Beberapa negara mengklaim wilayah tetangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan strategis, ekonomis atau sosial.

3. Tujuan Jangka Panjang Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu di dalamnya. Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka 25 panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya,

juga terdapat perbedaan penting dalam lingkup. Dalam rangka mengejar tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk mengejar tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali sistem internasional meneyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan (David, 2009: 147).

### 2.1.4 Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional terdapat elemen-elemen yang saling terkait, termasuk partisipan, kepentingan dan kekuasaan, yang berkontribusi pada perkembangan hubungan internasional itu sendiri. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hubungan internasional sering dikaitkan dengan kepentingan nasional. Dalam hubungan jenis ini, modus interaktif yang terbentuk tidak bisa lepas dari kepentingan nasional masing-masing aktor dalam interaksi tersebut. Pembentukan kepentingan nasional didasarkan pada keanekaragaman terbatas yang dimiliki masing-masing negara, serta adanya perbedaan antar negara. Ini dipengaruhi oleh kepribadian, budaya, sejarah, sumber daya yang berbeda, dll. Kepentingan nasional dibedakan menjadi empat (empat) jenis, yaitu ideologi, keamanan, ekonomi, dan prestise.

Hans J Morgenthau menjadi orang pertama yang mengekspos orang yang sejalan dengan kepentingan nasional adalah alat untuk mewujudkan dan mengejar kekuasaan, karena dengan kekuasaan, satu negara bisa menguasai negara lain. Menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi karakteristik material ( identitas

fisik ), politik dan budaya negara tersebut, yang tentunya tidak mengalami campur tangan dari negara lain.

Hubungan diplomatik yang baik antar negara merupakan salah satu bentuk kepentingan nasional. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan ini, termasuk pembangunan berkelanjutan, rencana pemerintah, dan kerja sama internasional. Kepentingan nasional sangat penting dalam keberlangsungan hubungan internasional, karena kepentingan nasional merupakan bagian dari hubungan internasional, dan perannya untuk menjaga kelangsungan dan kelangsungan hidup suatu negara melalui berbagai bidang dan bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, dan social- budaya dll.

Kepentingan nasional yang dikutip dalam buku Wijatmadja "Pengantar Hubungan Internasional" dapat ditentukan dengan berbagai standar. Pertama adalah standar ekonomi.Kebijakan untuk memperkuat status ekonomi negara adalah untuk kepentingan nasional. Kedua adalah standar ideologis, yang mempengaruhi negara untuk melihat dunia dengan cara tertentu dan menentukan kepentingan nasionalnya. Ketiga, standar keamanan militer Karena keamanan (pasukan) militer memegang peranan penting dalam hubungan internasional, negara memandang keamanan militer sebagai penentu kepentingan nasional. Keempat, standar etika dan legalitas, yang menjadi isu yang kerap menjadi sengketa dalam penentuan kepentingan nasional. Kelima, ragam standar, meliputi budaya, ras, etnis, dan masalah lainnya (Wijatmadja, 2016: 127-128).

Kepentingan nasional adalah usaha suatu negara untuk mengejar kekuasaan, dimana kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan

mempertahankan kendali suatu negara atas negara lain. Kekuasaan atau kendali semacam ini dapat dicapai baik secara kerjasama maupun secara pemaksaan. Oleh karena itu, kekuatan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana bagi suatu negara untuk bertahan dalam politik internasional, sekaligus tujuannya. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan dasar dan pilihan akhir yang memandu para pengambil keputusan suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan elemen terpenting yang merupakan kebutuhan terpenting negara tersebut, seperti pertahanan negara, keamanan, militer dan kemakmuran ekonomi. (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Dalam interaksi antar negara, interaksi dilakukan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional adalah tujuan utama, titik tolak dan akhir perjuangan bangsa (Perwita dan Yani, 2005: 41).

### 2.1.5 Diplomasi

Diplomasi dapat diartikan sebagai pengelolaan hubungan antar bangsa melalui negosiasi. Negosiasi yang disebutkan di sini biasanya dalam bentuk kesepakatan negosiasi atau kesepakatan implementasi, atau dalam bentuk tawar-menawar dengan negara lain untuk kepentingannya sendiri. Diplomasi sendiri merupakan alat bagi suatu negara untuk melaksanakan politik luar negerinya. Negara-negara berusaha untuk berkomunikasi melalui perwakilan resmi dan aktor lain untuk mengkoordinasikan dan memastikan kepentingan nasional yang spesifik atau lebih luas, yang dicapai melalui komunikasi, dialog informal, berbagi pandangan, negosiasi, kunjungan, dan kegiatan terkait lainnya (Djelantik, 2008: 4).

Diplomasi memiliki kaitan erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih (Djelantik, 2008 : 13). Diplomasi dalam pengertian yang khusus didefinisikan sebagai *sense used international relations it is the art of negotiation in order to achieve the maximum of group objectives with a minimum of cost,, with in a system of politics in which is a possibility* (diplomasi dalam hubungan internasional merupakan seni dalam bernegosiasi untuk mencapai tujuan kelompok secara maksimal dengan biaya minimum) (Sitepu, 2011 : 198). Praktek diplomasi masa kini secara garis besar dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti, revolusi teknologi informasi, meningkatnya peran media massa, globalisasi bisnis dan keuangan yang menyebabkan aktivitas diplomasi ekonomi menjadi makin signifikan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hubungan internasional, dan juga karena munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional seperti *trans organized crime*, terorisme, lingkungan hidup, HAM dan masalah lainnya(Djelantik dalam Hermawan, 2007 : 59).

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa hambatan birokrasi. Media massa modern menegaskan gagasan `` diplomasi tanpa diplomat ". Perkembangan lainnya adalah peran media massa dalam mengatur lingkungan dan mekanisme diplomatik. Media seringkali dipandang sebagai pendukung dan penghambat diplomasi. Peran mereka melalui siaran satelit sangat membantu dalam menyediakan dan bertindak sebagai negosiator (Surya, 2011: 58).

Media dan opini publik menjadi semakin penting dalam urusan internasional, dan para pemimpin semakin menampilkan diri kepada para pemilih dalam pekerjaan propaganda mereka. Diplomasi pada level tertinggi semakin

dipolitisasi, dan parlemen ingin mempelajari lebih jauh tentang politik luar negeri (Surya, 2011: 52). Diplomasi juga dapat mengacu pada cara dan bentuk kontak dan negosiasi dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara (Mauna, 2000: 465).

Revolusi komunikasi sudah menggantikan perwakilan nasional, diplomasi dan media komunikasi berdampak pada opini publik dunia, dan dampaknya berbeda dengan duta besar atau diplomat. Saat ini diplomasi dilakukan melalui media seperti televisi atau hal-hal yang bersentuhan dengan publik dan sering didengar dan dibaca oleh masyarakat. Selain itu citra negara dan pemimpinnya sangat penting, karena dalam era demokratisasi, kebijakan internasional akan dibahas oleh dunia internasional (Goldstein dalam Surya, 2011: 56).

Diplomasi merupakan salah satu media yang berperan sangat penting dalam perwujudan kepentingan nasional suatu negara dalam pembentukan suatu negara baik dalam hubungan bilateral atau multilateral. Diplomasi adalah suatu hubungan yang diartikan sebagai proses interaksi antara dua atau lebih negara atau organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan politik luar negeri negaranya masing-masing dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Istilah diplomasi biasanya setara dengan hubungan internasional atau masalah dunia, hubungan luar negeri, cara melakukan hubungan diplomatik, melakukan hubungan diplomatik, berkomunikasi dan bernegosiasi.

Diplomasi adalah seni dalam bernegosiasi atau berunding yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arti diplomasi dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan

yang punya tujuan khusus melalui seorang diplomat dalam perundingan. Diplomasi sangat erat hubungannya dalam kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain. Diplomasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik, umumnya negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam lingkungan internasional (Wijatmadja 2016, 147).

Diplomasi setidaknya mencakup 3 (tiga) fungsi utama diantaranya adalah perwakilan, negosiasi dan *reporting*. Pertama adalah perwakilan atau (*representation*) yang fungsi perwakilan dari para diplomat mencakup perwakilan substantif dan perwakilan simbolik. Kedua adalah negosiasi (*negotiation*) yaitu suatu proses dimana usulan-usulan yang eksplisit dimajukan dengan berbagai alasannya demi tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang suatu pertukaran atau tentang kesadaran atas kepentingan bersama yang mana pada saat itu ada konflik kepentingan. Ketiga adalah *reporting*, yaitu mengumpulkan informasi dan memberikan informasi tersebut kepada pembuat keputusan negara merupakan aktifitas utama dari para diplomat dan misi diplomatik di luar negeri (Wijatmadja, 2016 : 148-150).

#### 2.1.5.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik dalam buku *public diplomacy* karya Mark Leonard mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengkomunikasikan pandangan; membenarkan mispersepsi yang ada dalam masyarakat internasional; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Leonard, 2002:8). Hubungan yang

terjalin melalui diplomasi publik kemudian diharapkan dapat membuat suatu lingkungan yang baik bagi masyarakat antar negara untuk saling bekerja sama dan meningkatkan pertumbuhan transaksi di antara mereka.

Mark meyakini bahwa terdapat tiga tujuan yang dapat dicapai melalui diplomasi publik, yaitu (Leonard, 2002: 9):

1. Melalui hubungan dengan negara lain, membuat mereka memikirkan negara lain dan memiliki kesan yang baik terhadap suatu negara, sehingga meningkatkan hubungan suatu negara dengan negara lain.
2. Meningkatkan apresiasi publik terhadap negara tertentu, seperti berpandangan positif.
3. Memperkuat hubungan dengan masyarakat suatu negara, seperti kerjasama ilmiah melalui edukasi, mengajak masyarakat suatu negara untuk mengunjungi tempat wisata, menjadi konsumen produk lokal, dan memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dianut oleh peserta.
4. Orang yang mempengaruhi negara lain berinvestasi dan menjadi mitra dalam hubungan politik.

Melihat tujuan yang dikemukakan Mark, maka kita dapat melihat bahwa diplomasi publik memerlukan komunikasi dua arah untuk menciptakan komunikasi yang baik agar nilai dan pesan yang diberikan dapat diterima tanpa adanya kesalahpahaman. Hal ini juga menunjukkan bahwa diplomasi publik berbeda dengan propaganda. Propaganda sering dianggap mempunyai pengertian yang sama dengan diplomasi publik karena propaganda juga berfungsi untuk memengaruhi pihak lain agar

mempunyai pikiran yang sama dengan yang kita inginkan. dalam diplomasi publik ditekankan bahwa dalam prosesnya, kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain dan tidak bersifat memaksa.

Sehingga intinya, diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Dalam hal ini, publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif.

Dari semua definisi diplomasi publik tersebut, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power*.

Terlepas dari hal tersebut, pengembangan potensi kuliner yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang melalui peningkatan diplomasi publik juga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan citra negaranya di mata internasiona dan juga mempromosikan kuliner Indonesia. Hal ini diimplementasikan melalui penerapan gastrodiplomasi.

#### 2.1.5.2 Gastrodiplomasi

Kata gastrodiplomasi diambil dari kata gastronomi dan diplomasi. Kata gastronomi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "*gastros*" yang berarti "lambung" atau "perut" dan "*nomos*" yang artinya "pengetahuan" atau "ilmu". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), gastronomi adalah seni menyiapkan hidangan yang lezat-lezat; tata boga.

Diplomasi makanan pada dasarnya adalah pemanfaatan makanan dalam hubungan internasional untuk membangun perdamaian dan pemahaman budaya (Bradley 2014: 1). Dalam praktiknya, diplomasi makanan dicapai dengan berbagi warisan budaya antara makanan dan negara (Haugh, 2014). Diplomasi makanan memberikan kesempatan kepada publik asing untuk berpartisipasi dalam budaya nasional melalui makanan (biasanya jarak jauh) (Haugh, 2014). Diplomasi makanan juga dianggap sebagai strategi populer untuk diplomasi publik dan promosi merek nasional (Rockower 2012). Pengertian diplomasi makanan adalah bagaimana suatu negara melakukan diplomasi budaya dengan mengedepankan masakan khas masing-masing negara, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek nasional suatu negara, dan membantu masyarakat asing, khususnya orang asing yang tidak ingin bepergian, untuk mendapatkan pengalaman melalui suatu makanan kuliner dan beradaptasi dengan budaya negara lain (Rockower 2012).

Studi gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya. Indra Ketaren, Presiden Indonesia Gastronomy Association, pernah mengatakan bahwa gastronomi dalam bahasa akademis memiliki arti yang disebut sebagai *the art of good eating* atau dengan seni gastronomi. Secara umum, gastronomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kuliner dengan berbagai komponen budaya dan sejarah, dimana makanan menjadi poros sentral yang berfokus pada hidangan

berkualitas tinggi (*gourmet*). Sederhananya, Indra Ketaren mengatakan bahwa gastronomi adalah penikmat dan pemerhati kuliner, serta memberikan penilaian makanan berdasarkan sejarah, budaya, lanskap geografis, dan metode memasak.

Melalui pendekatan gastronomi memungkinkan untuk membangun sebuah gambaran dari persamaan atau perbedaan pendekatan atau perilaku terhadap makanan dan minuman yang digunakan diberbagai negara dan budaya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai negara di dunia untuk memanfaatkan media makanan atau kuliner khas sebagai bagian dari diplomasi yang akhirnya dikenal sebagai *gastrodiplomacy*. Kegiatan diplomasi melalui makanan ini, merupakan bentuk gabungan dari diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan.

Melalui metode gastronomi, dimungkinkan untuk menggambarkan persamaan atau perbedaan metode atau sikap makanan dan minuman yang digunakan oleh negara dan budaya yang berbeda. Ini kemudian digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menggunakan makanan khusus atau media kuliner sebagai bagian dari diplomasi, dan diplomasi pada akhirnya disebut "diplomasi makanan". Diplomasi melalui makanan merupakan gabungan dari diplomasi publik dan diplomasi budaya.

Diplomasi makanan sendiri memiliki karakteristik yang menentukan apakah proses tersebut termasuk dalam diplomasi makanan atau bukan. Dengan membandingkan dengan praktik diplomasi kuliner, Paul Rockower memberikan beberapa wawasan tentang diplomasi kuliner:

1. Berdiplomasi publik yang mencoba berkomunikasi mengenai budaya kuliner dengan publik asing dengan cara yang lebih luas, dan memfokuskan diri pada publik yang lebih luas dari pada level elit saja.
2. Praktek gastrodiplomasi ini berusaha untuk meningkatkan citra makanan bangsa melalui diplomasi budaya yang kemudian menyoroti dan mempromosikan kesadaran dan pemahaman budaya kuliner nasional kepada publik asing.
3. Gastrodiplomasi berupa hubungan *state to public relations* (Rockower, 2011: 107-152).

Jadi, ketika makanan digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan interaksi antara masyarakat kepada masyarakat *(people-to-people)* untuk meningkatkan pemahaman budaya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai bentuk dari praktek gastrodiplomasi.

Dalam kajian Hubungan Internasional, adanya dua pendekatan yaitu *soft power* dan *hard power* (Nye, 2004). Gastrodiplomasi berada pada ranah *soft power,* yang mana kuliner dapat diartikan sebagai pendekatan tanpa menggunakan ancaman dalam berinteraksi dengan masyarakat luar negeri yang dapat membuka akses terhadap kemungkinan kerjasama ekonomi maupun politik antar negara (Wilson, 2013).

Diplomasi makanan *(food diplomacy)* pada prinsipnya adalah "diplomasi melalui makanan", yang merupakan cabang lain dari diplomasi (atau diplomasi publik), di mana *soft power* digunakan sebagai alat perang.

Secara ringkas diplomasi makanan adalah "tindakan memenangkan hati & pikiran melalui perut" (Paul Rockower 2011). Makanan dengan keramah-tamahan budayanya digunakan sebagai lensa diplomasi yang dimanfaatkan aktor dan elit politik suatu negara sebagai bentuk diplomasi Pemerintahan yang bersangkutan.

Tidak hanya sebatas makanan (boga) ditampilkan dalam upacara diplomatik. Kemasan makanan juga mengikutsertakan gagasan (wujud ideal) dan artefak (karya) mengenai kisah sejarah & budayanya. Artinya modul makanan, ditambah sejarah & budaya, dimanfaatkan dalam tindakan diplomasi untuk menarik atau memaksa lawan aktor dan elit politik (*counterpart*) mengubah sikap mereka. Dengan demikian makanan digunakan untuk mengamati dan menggambarkan hubungan kekuasaan di bidang politik yang diperagakan dalam simbolik dari makanan itu sendiri.

Penggunaan diplomasi makanan sebagai brand atau trademark suatu bangsa adalah salah satu alat khusus pemerintah, yang digunakan secara luas dan lebih kuat dibanding penggunaan diplomasi budaya itu sendiri, walaupun makanan masuk dalam arti budaya. Diplomasi makanan (*food diplomacy*) digunakan sebagai sarana interaksi dalam kepentingan mengkomunikasikan ide maupun informasi kepada counterpart di luar jalur birokrasi yang kaku. *Prestise* & kewibawaan Pemerintah diperagakan dalam kepentingan memperlihatkan kepada *counterpart* mengenai kemahiran Negara merepresentasikan kekayaan budaya melalui perhelatan makanan. Bisa dikatakan diplomasi makanan merupakan sumber kekuatan

& instrumen Pemerintah dalam meningkatkan interaksi dan kerja sama internasional, baik bilateral, regional & multilateral.

Pada intinya, diplomasi makanan (*food diplomacy*) adalah instrumen negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari hubungan internasional maupun dalam menterjemahkan aristokrasi politik serta atribut kekuasaan negara. Selain itu negara juga menyadari potensi diplomasi makanan pun mampu menciptakan pemahaman lintas-budaya kepada masyarakat kebanyakan.

Maksudnya, diplomasi makanan bukan hanya terbatas digunakan sebagai instrumen diplomasi politik tingkat atas, tetapi juga berdaya guna sebagai alat kampanye (*campaign tools*) untuk pengenalan & pertukaran budaya secara informal kepada masyarakat kebanyakan (publik).

Peran diplomasi makanan di tingkat bawah (*grassroots level*) tetap sebagai alat diplomasi dengan catatan untuk memperkenalkan budaya masakan nasional bersangkutan kepada masyarakat di luar negeri, termasuk mengenai kisah sejarah & budayanya.

Kepentingannya ada 2 (dua), yakni :

Pertama, kepentingan langsung sebagai mesin penguatan ekonomi Nasional, antara lain pemasaran & promosi kepariwisataan, ekonomi

kreatif, meningkatkan devisa dari ekspor *Food & Beverages*, membuka lapangan kerja (*creating jobs*), dan lain sebagainya.

Kedua, kepentingan tidak langsung (*intangible*) untuk meningkatkan *branding power equity* (*image, prestise & identitas), entrepreneurship ratio dan brand power* perdagangan, serta sebagai gerakan diplomasi kebudayaan, memperkenalkan karakter, jati diri, maupun kearifan lokal (*local genius*) suatu bangsa melalui makanan.

Modul diplomasi makanan di tingkat bawah (*grassroots level*) ini berkembang sangat pesat secara global sebagai bentuk pertukaran lintas budaya antar bangsa. Seperti dijelaskan di atas, diplomasi makanan (*food diplomacy*) terbagi dalam 2 (dua) model, yakni :

i. Terkait dengan aktivitas diplomasi tingkat atas (*top level*), yakni lobi, negosiasi & upacara diplomatik kenegaraan (*state diplomatic ceremonial*) dari pimpinan Pemerintahan & Negara (*Government Leaders & Head of State*), baik itu eksekutif & legislatif, dengan counterpartnya di luar negeri. Dikenal dengan istilah *Culinary Diplomacy* yang aktivitasnya melalui perjamuan makan Andrawina (*official banquet*) Adiboga (*fine dine*) di meja perundingan, untuk meningkatkan interaksi dan kerja sama maupun menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari hubungan internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral.

ii. Terkait dengan aktivitas diplomasi tingkat bawah (*grassroots level*) untuk pertukaran budaya kepada masyarakat kebanyakan (publik) di luar negeri, dengan memperkenalkan makanan nasional bersangkutan.

Dikenal dengan istilah *Gastronomy Diplomacy* yang aktivitasnya melalui makanan jajanan jalanan (*street food atau hawkers*), rumah makan, restoran, acara-acara festival makanan, maupun lainnya.

*Gastronomy Diplomacy* menekankan kepada interaksi masyarakat antar bangsa (*community interaction among nations*) dalam memperkenalkan budaya makanan nasional bersangkutan.

*Gastronomy Diplomacy* difikrahkan dengan frasa yang populer sebagai GastroDiplomasi (*GastroDiplomacy*) yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Diplomasi Upaboga.

*GastroDiplomacy* itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni :

i. *Gastronomy Luxury* : diperuntukkan bagi kalangan high end dengan kapasitas terbatas dan mampu membayar dengan harga tinggi, yang ingin mengenal dan mempelajari sejarah dan budaya makanan serta penggunaan produk lokal (seperti bumbu dan rempah), resep tradisional maupun cara proses pembuatannya. Kalangan *high end* kerap keliling dunia mencari kenikmatan dan pengalaman artistik sensorik masakan (*high level*

*cuisine*) dari kreasi master chef yang memiliki reputasi yang sudah diakui kepiawaiannya. Kemewahan *hospitality*, presentasi dan kelezatan hidangan *Food & Beverages* yang terbaik menjadi incaran utama kalangan *high end*, disamping mengenal dan mempelajari sejarah dan budaya dari makanan itu sendiri.

ii. *Gastronomy Conventional* (Popular) : diperuntukkan bagi kalangan kebanyakan (publik), yang ingin mengenal dan mempelajari sejarah dan budaya makanan serta penggunaan produk lokal (seperti bumbu dan rempah), resep tradisional maupun cara proses pembuatannya.

Kalangan kebanyakan tidak terlalu menghiraukan soal kemewahan dan siapa pemasaknya (bisa chef professional atau pemasak otodidak). Bagi mereka yang paling penting adalah kenikmatan dan pengalaman artistik sensorik seni masakan dengan harga yang kejangkau dan tidak mahal.

Istilah *Gastronomy Diplomacy* sering disandingkan dengan *Culinary Diplomacy*, namun pada prakteknya kedua bentuk diplomasi ini memiliki sedikit perbedaan seperti dijelaskan di atas. Bisa juga dikatakan, *GastroDiplomacy* dan *Culinary Diplomacy* adalah 2 (dua) hal yang hampir sama tapi berbeda, alias serupa tapi tidak sama.

Istilah keduanya merujuk pada cara berbeda di mana makanan bertindak sebagai media untuk pertukaran diplomatik (Joseph Nye, 2004). Pada hakekatnya *Culinary Diplomacy* lebih menekankan urusan makanan

dalam ruang lingkup resmi (*scope formal official*), sedangkan *GastroDiplomacy* menekankan makanan kepada kalangan masyarakat kebanyakan (*grassroots level*).

Gecowets, Valerie, (2014) mengatakan GastroDiplomacy berkepentingan dalam "memperkenalkan makanan sebagai budaya *(exchange & identification of culture)* orang ke orang (*people to people*) secara informal".

Sedangkan GastroDiplomacy adalah promosi budaya makanan kepada masyarakat kebanyakan (publik) di negara lain dengan menggunakan berbagai macam makanan khas untuk memperkenalkan cita rasa dari masyarakat lokal (*ethnic communities*) kepada masyarakat dari negara lain. Jenis makanan (boga) yang disajikan GastroDiplomacy adalah *grassroots level cuisine* yang biasanya diperuntukkan bagi yang ingin mengenal dan mempelajari sejarah & budaya makanan suatu bangsa, serta penggunaan produk lokal (seperti bumbu dan rempah), resep tradisional maupun cara proses pembuatannya. Bentuk aksinya dilakukan melalui makanan jajanan jalanan (*street food*), rumah makan, restoran, maupun acara festival makanan serta kunjungan pariwisata.

*Grassroots level cuisine* diperuntukkan bagi *Gastronomy Conventional* (Popular), sedangkan untuk *Gastronomy Luxury*, jenis makanan (boga) yang disajikan serupa dengan *Culinary Diplomacy* namun

jenisnya hanya berupa Adiboga (*fine dine high level cuisine*) tanpa Andrawina, dan pelakunya adalah kalangan *high end*.

Paul S. Rockower (2011) mengatakan *GastroDiplomacy & Culinary Diplomacy* adalah pengejaran diplomasi publik (*as the pursuit of a public diplomacy*) dari sarana protokol diplomatik negara melalui masakan. Keduanya adalah komponen utama dari kebijakan pangan luar negeri suatu negara. Namun *GastroDiplomacy* itu sendiri memiliki dampak yang lebih terlihat & nyata pada akar rumput dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

*Culinary Diplomacy* dan *GastroDiplomacy*, dua istilah yang hampir tidak pernah terdengar, bahkan satu dekade yang lalu, sekarang menjadi bentuk pertukaran budaya antar Pemerintah yang berkembang sangat pesat secara global. Tidak mungkin mengabaikan dampak makanan terhadap diplomasi dan pertukaran internasional. Istilah *GastroDiplomacy* itu sendiri sangat populer dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagai sebuah pencapaian dalam perkembangan bentuk *public diplomacy*, dan muncul sebagai strategi bagi negara-negara untuk menggunakan keunikan makanan mereka dalam rangka mempromosikan diri kepada masyarakat kebanyakan secara global. *GastroDiplomacy* mempengaruhi hampir semua masyarakat di dunia, dan bisa dikatakan menunjukkan bentuk penting dari kekuatan lunak diplomasi (*soft power diplomacy*) yang akan terus menerus signifikan di dunia ini secara global.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi lintas batas suatu negara. Namun dalam proses perkembangannya, interaksi semacam ini tidak hanya dilakukan oleh para aktor negara, tetapi setiap orang dapat berinteraksi karena setiap orang berperan penting dalam hubungan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing, karena kepentingan nasional merupakan hal yang vital bagi suatu negara dalam hubungan internasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional adalah terwujudnya hubungan diplomatik dan kepentingan nasional, salah satunya melalui rencana pemerintah dan kerjasama internasional. Seperti Indonesia melihat peluang-peluang besar di Afrika Selatan sehingga membuat Indonesia melakukan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan dan sampai sekarang sudah terjalin cukup lama dan peluang keuntungan yang didapat oleh dua negara ini dengan tujuannya masing-masing. Melalui hubungan bilateral ini, Indonesia dan Afrika Selatan mempunyai sebuah hasil yang disebut kerjasama internasional.

Dalam kasus penelitian ini, pasar Indonesia menjadi salah satu program tahunan yang terdapat di KBRI Pretoria dimana program ini adalah bentuk upaya KBRI Pretoria dalam memperkenalkan Indonesia di negara Afrika Selatan melalui *people-to-people contact.* Melalui kegiatan ini masyarakat Afrika Selatan bisa lebih mengenal Indonesia dengan menikmati setiap santapan juga pameran kebudayaan yang disajikan oleh KBRI Pretoria dan mempererat hubungan bilateral Indonesia – Afrika Selatan juga memperkaya dan memperluas strategi kerjasama antara Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk memperkenalkan Indonesia di Afrika Selatan dengan melihat dari perspektif, dimana pasar Indonesia dilaksanakkan oleh KBRI dan bekerjasama dengan pusat promosi perdagangan Indonesia ( ITPC ) di Johannesburg, Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) KRI Pretoria, serta diaspora pelaku usaha kuliner di Afrika Selatan. Pameran pasar Indonesia ini menjadi sebuah Langkah awal yang penting dalam upaya pelaksanaan gastrodiplomasi bagi masyarakat Afrika Selatan.

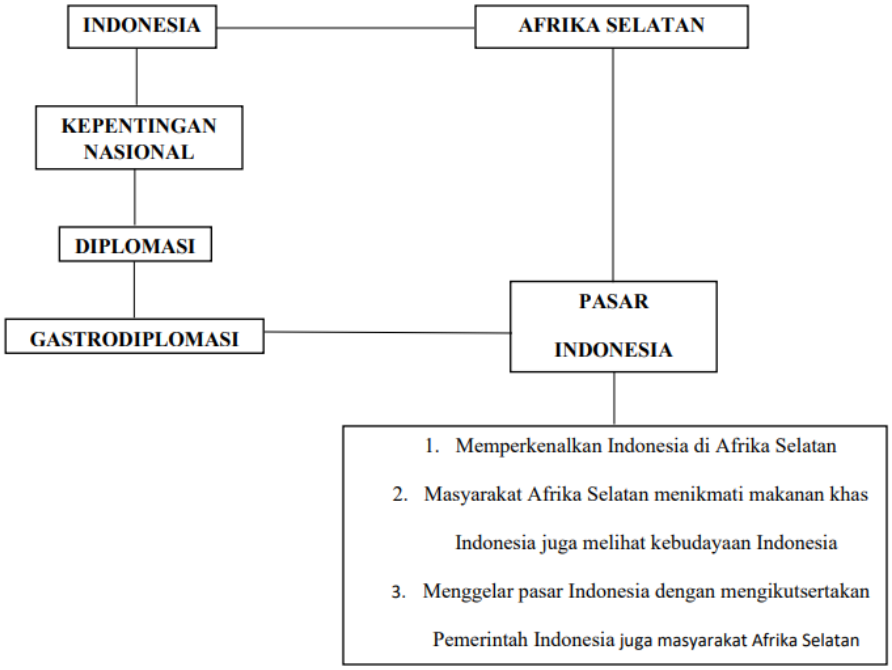


**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**